

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2007
CONCERNING
THE MANAGEMENT OF COASTAL ZONES AND SMALL ISLANDS

BY THE GRACE OF GOD**

THE PRESIDENT'S OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- Considering :
- a. that coastal zones and small islands are part of the natural resources that is bestowed by God the Almighty and form as resources under State's authority, which needs to be preserved and utilized to be exploited to the greatest benefit of the people, for the present as well as the next generation;
 - b. that coastal zones and small islands have a high diversity of resource potentials, and is very important for the social, economic, culture, and environment developments, and to uphold national sovereignty; and is therefore shall be managed in a sustainable manner with global vision, taking into account people's aspiration and participation, and national values based on national legal norms;
 - c. that based on the considerations as stipulated in letters a and b, it is necessary to establish a Law concerning the Management of Coastal Zones and Small Islands;

Taking into account : Articles 20, 21, 25A, and 33 paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

**By Agreement Between
THE INDONESIAN PEOPLE'S REPRESENTATIVES
And
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DECIDED:**

To enact : **LAW CONCERNING THE MANAGEMENT OF COASTAL ZONES AND SMALL ISLANDS**

BAB I KETENTUAN UMUM	CHAPTER I GENERAL PRINCIPLES
Pasal 1	Article 1
<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>In this Law, the meaning of:</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.	<ol style="list-style-type: none">1. The Management of Coastal Zones and Small Islands is a process of inter-agency planning, exploitation, control and management of Coastal Zones and Small Islands Resources, between Central and Local governments, between the land and marine ecosystems, as well as between science and management, to enhance people's prosperity.2. Coastal Zone is the transition area between land and sea influenced by the changes at land and sea.3. Small Island is an island with an area of less or equal to 2,000 square kilometers together with its ecosystem.4. Coastal Zone and Small Island Resources are living resources; non-living resources; artificial/man-made resources, and environmental services; living resources consists of fish, coral reef, sea-grass beds, mangrove and other marine biota's; non-living resources consists of sand, sea-water and sea-bed minerals; artificial/man-made resources consists of marine infrastructures related to maritime affairs and fisheries; and environmental services consists of natural beauty, the sea-bed where submerged marine and fisheries installations are placed, and sea waves energy that can be found in Coastal Areas.5. Ecosystem is a community of vegetation, animals, organism and other non-organism together with the process connecting them to form balance, stability and productivity.6. Bio-eco region is a landscape within a stretch of ecological unity which is determined by natural boundaries, such as river banks, bay and currents.7. Coastal Waters are maritime area bordering land area up to 12 (twelve) nautical miles measured from the coastline, coastal waters connects the coasts and islands, estuary, bay, shallow waters, brackish waters and lagoon.8. A Region is a section of the Coastal Zone and Small Islands which has particular functions determined on the basis of its characteristics, biology, social and economic criteria to maintain its existence.

<p>9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.</p> <p>10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.</p> <p>11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.</p> <p>12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.</p> <p>13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional</p> <p>14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.</p> <p>15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.</p> <p>16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.</p>	<p>9. Public Utilization Area is a section of the Coastal Zone whose allocation has been established for various agencies activities.</p> <p>10. Particular National Strategic Area is Area relevant to national sovereignty, living environment management, and/or world heritage sites, whose development is being prioritized for national interests.</p> <p>11. A Zone is space whose exploitation is determined by agreement between various stakeholders and has an established legal status.</p> <p>12. Zoning is a type of technical engineering of space utilization through the establishment of functional borders taking into accounts its resource potentials and carrying capacity together with the ecological processes as a unit within a Coastal ecosystem.</p> <p>13. Strategic Plan is a plan consisting of inter-agency policy for a Development plan area, through the establishment of purposes, goals and extensive strategy, together with implementation targets and appropriate indicators for the monitoring plans at the national level.</p> <p>14. Zoning Plan is a plan determining the course of resource exploitation of each unit of planning accompanied by the establishment of space structure and pattern in the Planning area containing permitted and prohibited activities, and activities that require license or permit.</p> <p>15. Management Plan is a plan containing policy framework, procedure, and responsibility, for the coordination in decision making between various governmental agencies, with regard to resource exploitation or development within an established zone.</p> <p>16. Action Plan for Management is a follow up of the management plan for Coastal Zone and Small Islands which contains purposes, goals, budget, and schedule for one or more years in the future, in a coordinated way to carry out various activities needed by Government agencies, Local governments, and other stakeholders in order to achieve the result of the management of coastal zone and small islands resources in each Planning area.</p>
--	--

<p>17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.</p> <p>19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.</p> <p>20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.</p> <p>21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</p> <p>22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.</p> <p>23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.</p> <p>24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.</p>	<p>17. Detailed Zoning Plan is a detailed plan within one Zone on the basis of management directives of the Zoning Plan which can be established by the Local Government taking into account the carrying capacity of the environment and applicable technology, together with the availability of infrastructures, which in turn will show types and number of licenses which can be issued by the Local Government.</p> <p>18. Right to Undertake Business in Coastal Waters which shall be referred to as HP-3, is a right in particular sections of the coastal waters to carry out marine and fisheries business, and other types of undertaking related to the exploitation of Coastal Zone and Small Islands Resources, which includes surface waters and water columns above the sea-bed in particular limited extent.</p> <p>19. Conservation of the Coastal Zone and Small Islands is efforts on the protection, preservation and exploitation of Coastal Zone and Small Islands including their ecosystems to guarantee the existence, supply and sustainability of Coastal Zone and Small Islands Resources, through the preservation and improvement of its quality and diversity.</p> <p>20. Conservation Area within the Coastal Zone and Small Islands is the coastal zone and small islands with particular characteristics which is protected to realization of sustainable management of the Coastal Area and Small Islands.</p> <p>21. Coastal belt is land area along the coast with a width proportional to the shape and physical condition of the coast, at a minimum of 100 meters from the highest tide level toward the land area.</p> <p>22. Rehabilitation of Coastal Zone and Small Islands Resources is restoration and improvement of the ecosystem or population condition which has been degraded even though the result is different from the original condition.</p> <p>23. Reclamation is an activity carried out by a person for the purpose to improve the use of the terrain viewed from the environment and socio-economic aspects, by reclamation or draining.</p> <p>24. Carrying Capacity of Coastal Zone and Small Islands is the capacity of Coastal Zone and Small Islands to support human habitation and other living organism.</p>
---	--

<p>25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.</p> <p>30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.</p> <p>31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.</p> <p>32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	<p>25. Disaster Mitigation is an effort to reduce risk disaster, structurally as well as physically through the natural-physical and/or artificial/man-made development, also non-structurally or non-physically by increasing the capacity to deal with disaster threat in the Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>26. Coastal Disaster is natural or man-induced incidence which triggers a change of physical and/or living characteristics of the coastal zone and resulted in the loss of life, property, and/or damage to the Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>27. Massive Effect is the incidence effecting negative changes in the function of the environment at large scale and long intensity, which is triggered by a business undertaking and/or activity within the Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>28. Pollution of the Coastal Zone is the introduction of living organism, substance, energy, and/or other components to the coastal environment, induced by man's activity resulting in the reduction of coastal environment quality to a certain level, and causing the coastal environment not to function in accordance with its allocation.</p> <p>29. Accreditation is a recognition procedure for an activity which has consistently meets the required standard of management system of Coastal Zone and Small Islands that includes appraisal, valuation, and incentive for management programs carried out voluntarily by the community.</p> <p>30. Primary Stakeholders are users of Coastal Zone and Small Islands Resources who have a direct interest in the optimum utilization of the Coastal Zone and Small Islands Resources, such as traditional fishermen, modern fishermen, fish farmer, tourism industry, fishing industry, and Coastal Communities.</p> <p>31. Community Empowerment is efforts to provide facilities, endorsement or assistance to the Coastal Community to enable them to make the best option in the utilization of Coastal Zone and Small Islands Resources.</p> <p>32. The Community consists of indigenous (Adat) Community and Local Community living in the Coastal Zone and Small Islands.</p>
--	---

<p>33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.</p> <p>34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.</p> <p>35. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.</p> <p>36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.</p> <p>37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.</p> <p>38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.</p> <p>39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>33. Indigenous Community is a group of Coastal Communities which for generations have live in particular geographic area because they are bound by root ancestors, and has a strong bond with the Coastal Zone and Small Islands Resources, together with the existence of value systems which determined the economic, politic, social and legal institutions.</p> <p>34. Local Community is a group of people which practice every day's living based on customs which has been accepted as public values, however, not depending entirely on particular Coastal Zone and Small Islands Resources.</p> <p>35. Traditional Community is traditional fishery community whose traditional rights in fishing activities or any legitimate rights are still recognized in particular areas within the archipelagic waters in accordance with international law of the sea.</p> <p>36. Local Wisdom is high values that are still valid in the community living system.</p> <p>37. Class Action is a claim in the form of a right of small group member of the community to bring a claim of a large amount on behalf of the public based on similar issues, legal facts, and compensation claim.</p> <p>38. A Person is an individual and/or a corporate/legal entity.</p> <p>39. The House of Representatives, hereinafter referred to as DPR, is the People's Representatives as is stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.</p> <p>40. Central Government, hereinafter referred to as the Government, is the President of the Republic of Indonesia having the power to carry out the government of the Unitary State of the Republic of Indonesia as is stipulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.</p> <p>41. Local Government is governors, regents or mayors, and Local officials being elements of the local government administration.</p> <p>42. Local Governance/Administration is the exercise of governance/ administration by the Local Government and the Regional Representatives Council, in accordance with the principles of autonomy and auxiliary, with extensive principles of autonomy in a system and principles of a Unitary State of the Republic of Indonesia as is stipulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.</p>
--	---

<p>43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.</p> <p>44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>43. Sea Partnership is a network of stakeholders in the Management of Coastal Zone and Small Islands, in the empowerment of the capacity of human resources, institutions, education, extension, partnership, training, applied research, and the development of recommended policies.</p> <p>44. Minister is the Minister who has the mandate and is responsible for marine affairs and fisheries.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.</p>	<p style="text-align: center;">Article 2</p> <p>The scope of the regulations on the Coastal Zone and Small Islands includes the transitional area between the land and marine area ecosystems which is influenced by the changes at land and sea; landward includes the administrative area of a sub district (<i>kecamatan</i>) and seaward up to 12 nautical miles measured from the coastline.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beraskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan. 	<p style="text-align: center;">CHAPTER II PRINCIPLES AND PURPOSES</p> <p style="text-align: center;">Article 3</p> <p>The management of Coastal Zone and Small Islands is carried out under the principles of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sustainability; b. consistency; c. integration; d. legal certainty; e. partnership; f. equality; g. community/public participation; h. transparency; i. decentralization; j. accountability; and k. justice.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan 	<p style="text-align: center;">Article 4</p> <p>Management of Coastal Zone and Small Islands shall be carried out with the purpose of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to prtotect, conserve, rehabilitate, utilize, and enrich Coastal Zone and Small Islands Resources and their ecological system in a sustainable manner; b. to create harmony and synergy between the Government and the Local Government in the management of Coastal Zone and Small Islands Resources; c. to strengthen community and government agencies participation, and motivate community initiative in the management of Coastal Zone and Small Islands Resources;

<p>d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	<p>d. to advance the social, economic and cultural values of the community through community participation in the exploitation of Coastal Zone and Small Islands Resources.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER III MANAGEMENT PROCESS OF COASTAL ZONE AND SMALL ISLANDS</p> <p style="text-align: center;">Article 5</p> <p>The management of Coastal Zone and Small Islands consists the activities of planning, exploitation, control and management of human interactions in the exploitation of Coastal Zone and Small Islands Resources and the natural process in a sustainable way, in the effort towards enhancing the community's prosperity and in guarding the Unitary State of the Republic of Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar-Pemerintah Daerah; c. antarsektor; d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. 	<p style="text-align: center;">Article 6</p> <p>The management of Coastal Zone and Small Islands as is stipulated in Article 5 shall be carried out by integrating the following activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. between the Government and the Local governments; b. among the Local governments; c. among sectors; d. between the Government, industry and the public; e. between land and marine ecosystems; and f. between science and the principles of management.
<p style="text-align: center;">BAB IV PERENCANAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. 	<p style="text-align: center;">CHAPTER IV THE PLANNING</p> <p style="text-align: center;">Part One General Principles</p> <p style="text-align: center;">Article 7</p> <p>(1) The Management Plan for Coastal Zone and Small Islands as is stipulated in Article 5, consists of :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Strategic Plan for Coastal Zone and Small Islands, hereinafter shall be referred to as RSWP-3-K; b. Zoning for Coastal Zone and Small Islands, hereinafter shall be referred to as RZWP-3-K c. Management Plan for Coastal Zone and Small Islands, hereinafter shall be referred to as RPWP-3-K; and d. Action Plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands, hereinafter shall be referred to as

<p>(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.</p>	<p>RAPWP-3-K.</p> <p>(2) The norms, standard and guidelines for the formulation of plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands shall be further regulated by a Minister Regulation.</p> <p>(3) The Local Government has the obligation to formulate all plans as stipulated in paragraph (1) in accordance with its jurisdiction.</p> <p>(4) In the formulation of a plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands, the Local Government shall include community participation based on the norms, standard and guidelines as stipulated in paragraph (2).</p> <p>(5) The Regency and Municipality governments formulates detailed Zoning Plans for each Zones of the Coastal Zone and Small Islands within their jurisdiction.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.</p>	<p style="text-align: center;">Part Two Strategic Plan for Coastal Zone and Small Islands</p> <p style="text-align: center;">Article 8</p> <p>(1) RSWP-3-K is an inseparable section of long term development plan for every Local Government.</p> <p>(2) RSWP-3-K as is stipulated in paragraph (1) shall take into account the interests of the Government and the Local Government.</p> <p>(3) The duration of RSWP-3-K of the Local Government is 20 (twenty) years and can be reviewed at least every 5 (five) years.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;</p>	<p style="text-align: center;">Part Three Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands</p> <p style="text-align: center;">Article 9</p> <p>(1) RZWP-3-K is the direction for the exploitation of resources within the Coastal Zone and Small Islands of the provincial and/or regency/municipality governments.</p> <p>(2) RZWP-3-K shall be harmonized, synchronized, and balanced with the Spatial-Territorial Plan of the provincial government or the regency/municipality government.</p> <p>(3) The planning for RZWP-3-K shall be carried out, taking into consideration:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. harmonization, synchronization, and balance with the carrying capacity of the ecosystem, the functions of exploitation and protection, space and time dimensions, socio-cultural and technological dimensions, and the security and defence functions;</p>

<p>b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan</p> <p>c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.</p> <p>(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>b. integration of various exploitation of resources, functions, environmental aesthetic, and the quality of the coastal zones; and</p> <p>c. the obligation to allocate space and public access in the exploitation of Coastal Zone and Small Islands that have social and economic functions.</p> <p>(4) The validity of RZWP-3-K is 20 (twenty) years and can be reviewed every 5 (five) years.</p> <p>(5) RZWP-3-K shall be established by a Local Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:</p> <p>a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;</p> <p>b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;</p> <p>c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan</p> <p>d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraph 1 Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands within the Province</p> <p style="text-align: center;">Article 10</p> <p>The Provincial RZWP-3- as is stipulated in Article 9, consists of:</p> <p>a. space allocation within the Public Utilization Area, Conservation Area, Particular National Strategic Area, and sea-lanes;</p> <p>b. the interconnection between land Ecosystem and marine Ecosystem within a Bio-eco region;</p> <p>c. the establishment of maritime space utilization; and</p> <p>d. the establishment of prioritized marine Area for conservation, socio-cultural, economic, sea-transportation, strategic industry and security and defence purposes.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:</p> <p>a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;</p> <p>b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.</p> <p>(2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraph 2 Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands within the Regency/Municipality</p> <p style="text-align: center;">Article 11</p> <p>(1) RZWP-3-K of the Regency/Municipality contains the directives for :</p> <p>a. space allocation within the Public Utilization Area Plan, Conservation Area plan, Particular National Strategic Area plan, and sea-lanes plan.</p> <p>b. the interconnection among the ecosystems of the Coastal Zone and Small Islands within a Bio-eco region.</p> <p>(2) The formulation of RZWP-3-K as is stipulated in paragraph (1) shall be in conformity and be integrated with the Government and Local Government’s plan taking into account Area, Zone, and/or Sea Lanes which has been established in accordance with existing laws and regulations.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) RPWP-3-K berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang; b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya. 	<p style="text-align: center;">Part Four Management Plan for Coastal Zone and Small Islands</p> <p style="text-align: center;">Article 12</p> <p>(1) RPWP-3-K contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. policy on regulation and administrative procedure for the exploitation of permitted and prohibited resources; b. the priority scale for the exploitation of resources in accordance with the characteristics of the Coastal Zone and Small Islands; c. a guaranteed accomodation of public considerations in the decision of the purposes of the management of the Area and revision of the determination of purposes and licensing; d. an organized and systematical report mechanism to guarantee the availability of accurate and accessible datas and information; and e. the availability of trained human resources to implement the policy and its procedures.
<p>(2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.</p>	<p>(2) RPWP-3-K shall be valid for 5 (five) years and can be reviewed at least once.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.</p> <p>(2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Part Five Action Plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands</p> <p style="text-align: center;">Article 13</p> <p>(1) RAPWP-3-K shall be implemented by directing Management and Zoning Plans as an effort to implement the strategic plan.</p> <p>(2) RAPWP-3-K is valid for 1 (one) up to 3 (three) years.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Mekanisme Penyusunan Rencana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-</p>	<p style="text-align: center;">Part Six Mechanism for the Formulation of a Plan</p> <p style="text-align: center;">Article 14</p> <p>(1) Proposal for the formulation of RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, and RAPWP-3-K shall be carried out by the Local Government and the industry.</p> <p>(2) Mechanism for the formulation of the provincial, regency/ municipality governments' RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, and RAPWP-3-K shall be carried out by in clusion of Public Participation.</p> <p>(3) The Local Government has the obligation to disseminate the drafts for RSWP-3-K,</p>

<p>3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p> <p>(4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>	<p>RZWP-3-K, RPWP-3-K, and RAPWP-3-K to get feed-back, reaction and suggestions for revision.</p> <p>(4) The Regent/Mayor shall bring the final draft plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands of the regency/municipality to the knowledge of the governor and the Minister.</p> <p>(5) The Governor shall submit the final draft of the plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands of the province to the Minister and regents/mayors of the provincial areas in question</p> <p>(6) The Governor or Minister shall give a coment and/or recommendation to the final draft plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands within 30 (thirty) working days.</p> <p>(7) In cases where such comment and/or recommendation as stipulated in paragraph (6) was not given, the final draft plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands will definitely enter into force.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Data dan Informasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.</p> <p>(5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Part Seven Data and Information</p> <p style="text-align: center;">Article 15</p> <p>(1) The Government and the Local Government have the obligation to manage data and information on Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(2) The updating of data and information shall be carried out by the Government and the Local Government periodically and shall be officially documented and published, as a public document, in accordance with the relevant laws and regulations.</p> <p>(3) Data and information as is stipulated in paragraph (1) can be utilized by all person and or stakeholders taking into account the interests of the Government and the Local Government.</p> <p>(4) All person exploiting the Coastal Zone and Small Islands Resources as is stipulated in paragraph (2) has the obligation to submit data and information to the Government and/or the Local Government at least 60 (sixty) days since the commencement of the exploitation.</p> <p>(5) Any changes in data and information as is stipulated in paragraph (1) can only be carried out with the consent of the Government and/or the Local Government.</p> <p>(6) The guidelines for the management of data and information concerning the Coastal Zone and Small Islands shall be regulated by a Minister Regulation.</p>

<p style="text-align: center;">BAB V PEMANFAATAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Hak Pengusahaan Perairan Pesisir</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.</p> <p>(2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER V THE UTILIZATION</p> <p style="text-align: center;">Part One Right to Undertake Business in Coastal Waters</p> <p style="text-align: center;">Article 16</p> <p>(1) Business undertaking in Coastal Waters is given in the form of HP-3.</p> <p>(2) HP-3 as is stipulated in paragraph (1) includes business undertaking on the sea surface, water column down to the seabed.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.</p> <p>(2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.</p>	<p style="text-align: center;">Article 17</p> <p>(1) HP-3 shall be issued for a particular area and duration.</p> <p>(2) The issuance of HP-3 as is stipulated in paragraph (1) shall take into account the importance of the preservation of Coastal Zone and Small Islands ecosystems, the indigenous (<i>Adat</i>) Community, and national interests and the rights of innocent passage for foreign vessels.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>HP-3 dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Masyarakat Adat. 	<p style="text-align: center;">Article 18</p> <p>HP-3 may be issued to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. All person of Indonesian citizenship; b. Corporate/legal entity incorporated under Indonesian law; and c. Indigenous (<i>Adat</i>) Community.
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 19</p> <p>(1) HP-3 shall be issued for the duration of 20 (twenty) years.</p> <p>(2) The duration as is stipulated in paragraph (1) may be extended for the first phase up to a period of 20 (twenty) years.</p> <p>(3) The duration as is stipulated in paragraph (2) may be extended for the second phase in accordance with existing laws and regulations.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.</p> <p>(2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.</p> <p>(3) HP-3 berakhir karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi; b. ditelantarkan; atau c. dicabut untuk kepentingan umum. 	<p style="text-align: center;">Article 20</p> <p>(1) HP-3 may shift, be transferred, and used as a collateral by being borne with collateral rights.</p> <p>(2) HP-3 shall be issued in the form of a certificate of HP-3.</p> <p>(3) HP-3 shall be terminated, on the ground of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the duration has come to an end and is not extended; b. is being neglected; or c. is being revoked based on public

<p>(4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>interest (4) The procedure for the issuance, registration, and revocation of HP-3 shall be further regulated by a Government Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.</p> <p>(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dokumen administratif; b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem; c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah. <p>(4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan; b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal; c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3. <p>(5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir; b. tidak didukung bukti ilmiah; atau c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan. 	<p style="text-align: center;">Article 21</p> <p>(1) The issuance of HP-3 shall follow after the fulfilment of technical, administrative and operational requirements.</p> <p>(2) Technical requirements as is stipulated in paragraph (1) shall includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. conformity with the Zoning plan and/or Management Plan for Coastal Zone and Small Islands; b. the result of public consultation is compatible with the size and volume of its exploitation; and c. consideration of the result of an analysis of various alternative proposals or activities having the potential to damage Coastal Zone and Small Islands Resources. <p>(3) Administrative requirements as is stipulated in paragraph (1) shall includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. submission of administrative documents; b. formulation of plan and implementation of the exploitation of Coastal Zone and Small Islands Resources compatible with the carrying capacity of the ecosystem; c. the establishment of a system of control and reporting of its result to the agency that issue the HP-3; and d. in cases where the HP-3 directly bordering the coastline, the applicant shall already have property right over the land. <p>(4) Operational requirements as is stipulated in paragraph (1) shall includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. empowerment of the Community around the location of the activities; b. recognize, respect, and protect rights of the iIndigenous (<i>Adat</i>) Community and the Local Community; c. taking into account the Community rights to obtain access to the coast belt and estuary; and d. rehabilitation of damaged resources within the location of HP-3. <p>(5) Revocation to an application for an HP-3 shall be accompanied wth any of the following reasons:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. there is a serious threat to the preservation of the Coastal Zone; b. lack of scientific support; or c. there is potential for damage; d. damage which is predicted to happen cannot be restored.

<p>(6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.</p>	<p>(6) The issuance of a HP-3 as is stipulated in paragraph (1) shall be carried out by an open notification.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.</p>	<p style="text-align: center;">Article 22</p> <p>HP-3 cannot be issued for Conservation Area, fisheries sanctuary, navigational routes, port area, and public beaches.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.</p> <p>(2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan. <p>(3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. <p>(4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>(6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Section Two The Exploitation of Small Islands and Waters Surrounding It</p> <p style="text-align: center;">Article 23</p> <p>(1) The exploitation of Small Islands and waters surrounding it shall be carried out based on a comprehensive and integrated ecological and economical unity with the nearby large island.</p> <p>(2) The exploitation of Small Islands and waters surrounding it shall take priority for one or more of the following interests :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. conservation; b. education and training; c. research and development; d. mariculture; e. tourism; f. sustainable marine and fishery business and fishing industry; g. organic agriculture; and/or h. animal husbandry. <p>(3) Except for the purposes of conservation, education and training, research and development, the exploitation of Small islands and waters surrounding it, shall :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fulfil the requirements for the management of the environment; b. take into account the capacity of the local water management system; and c. apply environment friendly technology. <p>(4) The exploitation of Small islands and waters surrounding it as is stipulated in paragraph (2) that fulfil the requirements of paragraph (3) shall have an HP-3 that is issued by the Government or Local Government in accordance with their jurisdictions.</p> <p>(5) For the exploitation of Small islands and waters surrounding it which has been used for Public habitation purposes, the Government or the Local Government shall issue HP-3 only after having consulted it with the local Community in question.</p> <p>(6) The Regent/Mayor shall facilitate a mechanism for consultation as is stipulated in paragraph (5).</p> <p>(7) The utilization of Small islands and waters surrounding it by foreign persons shall require consent of the Minister.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi.</p>	<p style="text-align: center;">Article 24</p> <p>Small Island, sandbar, atol, and coral reefs which has been determined as base points for the measurement of the Indonesian territorial sea shall be established as protected areas by the Minister.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Article 25</p> <p>The exploitation of Small islands and waters surrounding it for the purposes of observation, research and data collection for scientific development, shall include the participations of relevant institutions and/or agencies, and/or local experts.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Article 26</p> <p>Regulations on the exploitation of Small islands and waters surrounding it as is stipulated in Articles 23, 24 and 25, shall be further regulated by a Minister Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Article 27</p> <p>(1) The utilization of the outermost Small islands shall be carried out by the Government in cooperation with the Local Government in an effort to safeguard the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.</p> <p>(2) The utilization of the outermost Small islands as is stipulated in paragraph (1) shall be further regulated by a Government Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Konservasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. <p>(2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.</p>	<p style="text-align: center;">Part Three Conservation</p> <p style="text-align: center;">Article 28</p> <p>(1) The conservation of the Coastal Zone and Small Islands is carried out for the purposes of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. protecting the preservation of the Ecosystems of Coastal Zone and Small Islands; b. protecting the migration channels of fish and other biotas; c. protecting the habitat of marine biotas; and d. protecting traditional cultural sites. <p>(2) For the purposes of conservation as is stipulated in paragraph (1), parts of the Coastal Zone and Small Islands may be established as Conservation Area.</p>

<p>(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumber daya ikan; b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain; c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan. <p>(4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kategori Kawasan Konservasi; b. Kawasan Konservasi nasional; c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut. <p>(7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.</p>	<p>(3) Conservation area as is stipulated in paragraph (2) which has a special characteristic as one unitary Ecosystem, shall be established for the protection of :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fishery resources; b. transit place and/or migration channels of other marine biotas; c. area under the regulation of particular custom (<i>Adat</i>), such as <i>sasi</i>, <i>mane'e</i>, <i>panglima laot</i>, <i>awig-awig</i>, and/or other terminology of particular customs; and d. a unique coastal zone ecosystem and/or which is vulnerable to changes. <p>(4) Conservation Area within the Coastal Zone and Small Islands shall be established by a Minister Regulation.</p> <p>(5) The Management of the Conservation Area as is stipulated in paragraph (2) shall be carried out by the Government of the Local Government based on jurisdiction in conformity with existing laws and regulations.</p> <p>(6) To achieve the purposes as is stipulated in paragraph (1), the Minister shall determine :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the category of Conservation Area; b. National Conservation Area; c. pattern and methods of management for the Conservation Area; and d. other things considered to be important for the achievement of such purposes. <p>(7) Proposals for a Conservation Area as is stipulated in paragraph (3) may be submitted by individuals, communal groups, and/or the Government/Local Government based on the special characteristic of the Area supported by data and scientific information.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Zona inti; b. Zona pemanfaatan terbatas; dan c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan. 	<p style="text-align: center;">Article 29</p> <p>Conservation area as is stipulated in Article 28 paragraph (2) is divided into three Zones, as follows :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nucleus Zone; b. Zone for limited exploitation; and c. Other Zones relevant to the allocation of the Area.
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.</p>	<p style="text-align: center;">Article 30</p> <p>The change of status of a Nucleus Zone as is stipulated in Article 29 into a zone for exploitation activities which may bring large impact, shall be determined by the Government or Local Government taking into account considerations of the DPR.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.</p> <p>(2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. pengaturan akses publik; serta f. pengaturan untuk saluran air dan limbah. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Article 31</p> <p>(1) The Local Government shall determine the boundary of the Coastal Belt which is based on the topographical, bio-physical, coastal hydro-oceanography characteristics, economic interests, and other provisions.</p> <p>(2) The determination of the boundary of the Coastal Belt shall be in conformity with the provisions on:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the protection against earthquake and/or tsunami; b. the protection of the coast against erosion or abrasion; c. the protection of coastal artificial/man-made resources from storm, flooding, and other natural disasters; d. the protection of coastal ecosystems, such as wetlands, mangrove, coral reef, seagrass beds, sand banks, estuary, and delta; e. the regulation of public access; and f. the regulation for waterworks/canal and waste. <p>(3) The boundary of the Coastal Belt shall be further regulated by a President Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Rehabilitasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.</p> <p>(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengayaan sumber daya hayati; b. perbaikan habitat; c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan d. ramah lingkungan. 	<p style="text-align: center;">Part Four Rehabilitation</p> <p style="text-align: center;">Article 32</p> <p>(1) The rehabilitation of Coastal Zone and Small Islands shall be carried out by taking into account the balance of the Ecosystem and/or the local biodiversity.</p> <p>(2) Rehabilitation as stipulated in paragraph (1) shall be carried out by:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. enrichment of the living resources; b. improvement of the habitat; c. the protection of marine biota species to enable them to grow and develop naturally; and d. environment friendly.
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Article 33</p> <p>(1) Rehabilitation as is stipulated in Article 32 shall be carried out by the Government and/or the Local Government and/or any person who directly or indirectly benefitted from the Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(2) Further provisions on Rehabilitation shall be regulated by a President Regulation.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Reklamasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.</p> <p>(2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat; b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. <p>(3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Part Five Reclamation</p> <p style="text-align: center;">Article 34</p> <p>(1) Reclamation of the Coastal Zone and Small Islands shall be carried out within the framework to enhance the benefit and/or additional value of the Coastal Zone and Small Islands viewed from technical, environmental, and socio-economic aspects.</p> <p>(2) Reclamation as is stipulated in paragraph (1) shall protect and take into account :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sustainability of habitation and livelihood of the Community; b. balance between exploitation and preservation of the environmental functions of the Coastal Zone and Small Islands; and c. technical requirements for mining, dredging, and piling up of materials. <p>(3) The planning and execution of Reclamation shall be further regulated by a President Regulation</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Larangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang; b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain; h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun; i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; 	<p style="text-align: center;">Part Six Prohibition</p> <p style="text-align: center;">Article 35</p> <p>In the exploitation of Coastal Zone and Small Islands, all person directly or indirectly is prohibited from:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mining the coral reef that is damaging to the Ecosystem of the coral reef; b. collect coral reef from the Conservation Area; c. use explosives, toxic substances, and/or other substances that is damaging to the Ecosystem of the coral reef; d. use instruments, means, and other methods that is damaging to the Ecosystem of the coral reef; e. use means and methods that is damaging to the Ecosystem of mangrove which is inappropriate for the characteristic of Coastal Zone and Small Islands; f. carry out the conversion of the mangrove Ecosystem within the Area or Zone for mariculture which do not take into account the sustainability of the ecological function of the Coastal Zone and Small Islands; g. cut off mangrove from the Conservation Area for industrial activity, settlement, and/or other activities; h. use means and method which is damaging to the sea-grass beds; i. mining of sand in an area which is technically, ecologically, socio and/or culturally may caused damage to the environment and/or causing pollution to the environment and/or detrimental to the local

<p>j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;</p> <p>k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta</p> <p>l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.</p>	<p>Community;</p> <p>j. mining of oil and gas in an area which from the technical, ecological, social and/or cultural aspects is damaging to the environment and/or causing pollution to the environment and/or detrimental to the local Community;</p> <p>k. mining of minerals which from the technical, ecological, social and/or cultural aspects resulting in the damage to the environment and/or causing pollution to the environment and/or detrimental to the local Community; and</p> <p>l. carry out physical construction which is damaging to the environment and/or detrimental to the local Community.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.</p> <p>(2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.</p> <p>(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:</p> <p>a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta</p> <p>b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.</p> <p>(4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER VI CONTROL AND MONITORING</p> <p style="text-align: center;">Part One General</p> <p style="text-align: center;">Article 36</p> <p>(1) To guarantee the execution of an integrated and sustainable Management of Coastal Zone and Small Islands, there shall be control and/or monitoring of the implementation of provisions regarding the management of Coastal Zone and Small Islands, by particular officials which has the mandates in the management of Coastal Zone and Small Islands, in accordance with the characteristic of his/her functions and have been given special policing authority.</p> <p>(2) The control and/or monitoring as is stipulated in paragraph (1) shall be carried out by particular government officials (civil servants) who has the function in the management of Coastal Zone and Small Islands in accordance with the characteristics of his/her job.</p> <p>(3) The particular government officials as is stipulated in paragraph (2) have the authority to :</p> <p>a. exercise patrol within the Coastal Zone and Small Islands or within its jurisdiction; and</p> <p>b. receive reports regrading damage to the Coastal ecosystem, Conservation Area, Public Utilization Area, and Particular National Strategic Area.</p> <p>(4) The jurisdiction of the Officials as is stipulated in paragraph (3) shall be regulated by a Minister Regulation.</p> <p>(5) In the execution of control and monitoring of the Coastal Zone and Small Islands as is stipulated in paragraph (1), the Government and the Local Government has the obligation to monitor, carry field observation, and/or evaluating the plan and its implementation.</p>

<p>pelaksanaannya. (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(6) The Community may participate in the control and observation of the Coastal Zone and Small Islands as is stipulated in paragraph (1)</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Part Two Control</p> <p style="text-align: center;">Article 37</p> <p>Control on the planning and implementation of the Management of Coastal Zone and Small Islands shall be carried out in a coordinative way by the relevant agency in accordance with its jurisdiction.</p> <p style="text-align: center;">Article 38</p> <p>Control by the public shall be carried out through the submission of report and/or claim to the competent agency.</p> <p style="text-align: center;">Article 39</p> <p>Control on the planning and implementation of the Management of the Coastal Zone and Small Islands as is stipulated in Article 37 and 38 shall be further regulated by a Minister Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengendalian</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Program Akreditasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. relevansi isu prioritas; b. proses konsultasi publik; c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan; d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat; e. kemampuan implementasi yang memadai; dan f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 	<p style="text-align: center;">Part Three Monitoring</p> <p style="text-align: center;">Paragraph 1 Accreditation Program</p> <p style="text-align: center;">Article 40</p> <p>(1) In the implementation of control as is stipulated in Article 36 paragraph (1), the Government have the obligation to carry out Accreditation on the program for the Management of Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(2) In view of the execution of accreditation as is stipulated in paragraph (1) the Government may transfer its jurisdiction for the execution of accreditation to the Local Government.</p> <p>(3) Standard and Guidelines for Accreditation as is stipulated in paragraph (1) shall include :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the relevance of priority issues; b. public consultation process; c. positive impact to the preservation of the environment; d. impact to the improvement of public prosperity; e. appropriate implementation capacity; and f. the support of policy and program.

<p>(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau b. bantuan teknis. <p>(5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(4) The Government and/or the Local Government shall give incentives to the program manager of the Management of Coastal Zone and Small Islands which have been accredited, in the forms of :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. program assistance in accordance with the capacity of the Government which can be directed toward optimizing the accreditation program; and/or b. technical assistance. <p>(5) The Governor has the competence to formulate and/or submit proposal for the accreditation of program for the Management of Coastal Zone and Small Islands which is within his/her jurisdiction to the Government in accordance with the standards and guidelines as is stipulated in paragraph (3).</p> <p>(6) The Regent/Mayor have the competence to formulate and/or submit proposal for the accreditation program for the Management of Coastal Zone and Small Islands within his/her jurisdiction to the governor and/or the Government in accordance with the standards and guidelines as is stipulated in paragraph (3).</p> <p>(7) Community Organization and/or community group may formulate and/or submit proposal for the accreditation of program for the Management of Coastal Zone and Small Islands to the Government and/or the Local Government in accordance with the standards and guidelines as is stipulated in paragraph (3).</p> <p>(8) Further provision on the program for accreditation shall be further regulated by a Minister Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Mitra Bahari</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.</p> <p>(2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.</p> <p>(3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendampingan dan/atau penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian terapan; serta d. rekomendasi kebijakan. 	<p style="text-align: center;">Paragraph 2 Sea Partnership</p> <p style="text-align: center;">Article 41</p> <p>(1) In an effort to increase the capacity of the stakeholders in the Management of Coastal Zone and Small Islands, a Sea Partnership shall be established as a forum for cooperation between the Government, the Local Government, universities, non-governmental organizations, professional organizations, prominent figure of the community, and/or the industry.</p> <p>(2) Sea Partnership as is stipulated in paragraph (1) shall be facilitated by the Government, the Local Government, and/or the industry.</p> <p>(3) Activities of the Sea Partnership shall be concentrated in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. assistance and/or extension; b. education and training; c. applied research; and d. policy recommendation

<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(4) Further provisions on the activities of Sea Partnership as is stipulated in paragraph (3) shall be regulated by a Minister Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER VII RESEARCH AND DEVELOPMENT</p> <p style="text-align: center;">Article 42</p> <p>(1) To improve the quality of planning and implementation of the Management of Costal Zone and Small Islands, the Government shall carry out research and development of science and technology, and the development of human resources in the field of the management of a sustainable Costal Zone and Small Islands .</p> <p>(2) The Government shall regulate, encourage, and/or carry out research and development of the Management of Costal Zone and Small Islands, to produce the necessary science and technology for the management of Costal Zone and Small Islands, to make it more effective, efficient, economic, higly competitive and environment friendly, while respecting traditional wisdom or local culture.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p style="text-align: center;">Article 43</p> <p>Research and development on the Management of Costal Zone and Small Islands may be carried out by the Government, the Local Government, universities, non-governmental organizations, private research and development institutions, and/or individuals in conformity with the existing laws and regulations.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 44</p> <p>Research results shall be open to any party, except particular reserch results that has been proclaimed by the Government as being not for publication.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.</p> <p>(2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Article 45</p> <p>(1) All foreign person who carry our research within the Costal Zone and Small Islands has the obligation to obtain a permit from the Government.</p> <p>(2) Research conducted by a foreign person and/or foreign corporate/legal entity as is stipulated in paragraph (1) shall include participation by Indonesian researchers.</p>

<p>(3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.</p>	<p>(3) All foreign person conducting research in the Costal Zone and Small Islands shall submit his/her research results to the Government.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Article 46</p> <p>Further provisions on the execution of research and development within Costal Zone and Small Islands as is stipulated in Articles 42, 43, 44 and 45 shall be regulated by a President Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER VIII EDUCATION, TRAINING AND EXTENSION</p> <p style="text-align: center;">Article 47</p> <p>The Government shall carry out education, training and extension on the Management of Costal Zone and Small Islands to enhance human resource development in the field of Management of Costal Zone and Small Islands in accordance with existing laws and regulations.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.</p>	<p style="text-align: center;">Article 48</p> <p>In the operation of education, training and extension on the Management of Costal Zone and Small Islands, the Government may cooperate with various parties, both at the national or international levels.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Article 49</p> <p>Further provisions on the execution of education, training and extension on the Management of Costal Zone and Small Islands as is stipulated in Article 47 and 48 shall be regulated by a President Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX KEWENANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.</p> <p>(2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.</p> <p>(3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER IX AUTHORITY</p> <p style="text-align: center;">Article 50</p> <p>(1) The Minister has the authority to issue HP-3 for the Costal Zone and Small Islands located in the inter-povince areas and in Particular National Strategic Areas.</p> <p>(2) The Governor has the authority to issue HP-3 for the Coastal Waters up to 12 (twelve) nautical miles measured from the coastline toward the high seas and/or the archipelagic waters, and in the inter-regency/inter-municipality Coastal Waters.</p> <p>(3) The Regent/Mayor has the authority to issue HP-3 for Coastal Waters of 1/3 (one-third) of the areas within the provincial jurisdiction.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Menteri berwenang menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu, b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan c. Perubahan status Zona inti pada Kawasan Konservasi Perairan nasional. <p>(2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan DPR.</p> <p>(3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Article 51</p> <p>(1) The Minister has the authority to determine:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. HP-3 for the Particular National Strategic Areas; b. Permit for the exploitation of Small Islands which have a lagre impact to the environmental changes; and c. Change in the status of the Nucleus Zone within the Conservation Areas of the National Waters. <p>(2) The determination of HP-3 as is stipulated in paragraph (1), shall be carry out after taking into accoung the consideration of DPR.</p> <p>(3) Procedure for the determination as is stipulated in paragraph (1) shall be further regulated by a Government Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 52</p> <p>(1) The management of Coastal Zone and Small Islands shall be carried out by the Government and the Local Government.</p> <p>(2) To improve the efficacy of the Management of Coastal Zone and Small Islands, the Government may render assistance to the Local Government in the formulation and implementation of Action Plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(3) Within the framework for the enhancement of the exercise of local autonomy in the Coastal Zone and Small Islands, when necessary, the Government may establish a technical executing unit for the management of Coastal Zone and Small Islands.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.</p> <p>(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu; b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu; c. program akreditasi nasional; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan 	<p style="text-align: center;">Article 53</p> <p>(1) The Management of Coastal Zone and Small Islands at the national level, shall be carried out in an integrated way under the coordination of the Minister.</p> <p>(2) Type of activities that shall be coordinated as is stipulated in paragraph (1), covers:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluation of each proposal for plan of activities in each agency in accordance with the plan for an integrated Management of Coastal Zone and Small Islands; b. agencies, local and industry's planning, which have an inter-provincial characteristic and inter-Particular National Strategic Area; c. national accreditation program; d. recommendation for permit for activities in accordance with the government agencies' mandates; and e. supply of data and information for the Management of Coastal Zone and Small Islands which has an inter-provincial and inter-Particular National Strategic Area

<p>strategis.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>characteristics, having strategic purposes.</p> <p>(3) The execution of the activities as is stipulated in paragraph (2) shall be regulated by a President Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.</p> <p>(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi; b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha; c. program akreditasi skala provinsi; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah; serta e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi. <p>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Article 54</p> <p>(1) The Management of Coastal Zone and Small Islands at the provincial level shall be carried out in an integrated way through the coordination by the local government office in charge of marine affairs and fisheries.</p> <p>(2) the type of activities that shall be coordinated as is stipulated in paragraph (1) includes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. the evaluation of proposal of activities from each autonomous local government office or agency, in accordance with the plan for the provincial Management of Coastal Zone and Small Islands; b. the plan for each local agency, inter-regency/municipality, and the industry; c. accreditation at the scale of province; d. the recommendation for activity permit in accordance with the jurisdiction of the vertical local agencies, autonomous local government office, or local government institutions; and e. providing data and information for the provincial Management of Coastal Zone and Small Islands. <p>(3) The execution of activities as is stipulated in paragraph (2) shall be regulated by the governor.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.</p> <p>(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu; b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat; c. program akreditasi skala kabupaten/kota; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota. 	<p style="text-align: center;">Article 55</p> <p>(1) The Management of Coastal Zone and Small Islands at the regency/municipality level shall be carried out in an integrated way which shall be coordinated by the local government office in charge of marine affairs and fisheries.</p> <p>(2) The type of activities to be coordinated as is stipulated in paragraph (1) includes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. the evaluation of plan of activity of every stakeholder in accordance with the plan for the integrated Management of Coastal Zone and Small Islands; b. inter-agency plan, industry and the community; c. accreditation at the scale of regency/municipality; d. the recommendation for activity permit in accordance with the jurisdiction of each autonomous district or local agency; and e. providing data and information for the Management of Coastal Zone and Small Islands at the scale of regency/municipality.

<p>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.</p>	<p>(3) The execution of activities as is stipulated in paragraph (2) shall be regulated by the regent/mayor.</p>
<p style="text-align: center;">BAB X MITIGASI BENCANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER X DISASTER MITIGATION</p> <p style="text-align: center;">Article 56</p> <p>In the formulation of an integrated management and exploitation plans for Coastal Zone and Small Islands, the Government and/ot the Local Government shall include and implement parts on disaster mitigation for Coastal Zone and Small Islands in accordance with its type, level, and areas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Article 57</p> <p>Disaster mitigation for Coastal Zone and Small Islands shall be carried out by including the responsibilities of the Government, the Local Government and/or the community.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat; b. kelestarian lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; serta d. lingkup luas wilayah. 	<p style="text-align: center;">Article 58</p> <p>The execution of disaster mitigation of Coastal Zone and Small Islands as is stipulated in Article 57, shall be carried out by taking into account the followig aspects:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. social, economy and culture of the community; b. preservation of the living environment; c. benefit and efficacy; and d. scope of the size of the area.
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik. (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh instansi yang berwenang. (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 	<p style="text-align: center;">Article 59</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) All person who live in the Coastal Zone and Small Islands has the obligation to carry out disaster mitigation for activities which have the potential to cause damage to the Coastal Zone and Small Islands, (2) Disaster mitigation as is stipulated in paragraph (1) shall be carried out through structural/physical and /or non-structural/non-physical activities. (3) The choice of activity as is stipulated in paragraph (1) shall be determined by the competent agency. (4) (Provisions on disater and damage mitigation to the Coastal Zone and Small Islands shall be further regulated by a Government Regulation.

<p style="text-align: center;">BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER XI RIGHTS, OBLIGATIONS, AND PUBLIC PARTICIPATION</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p>	<p style="text-align: center;">Article 60</p>
<p>(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; sertaj. memperoleh ganti kerugian. <p>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau	<p>(1) In the Management of Coastal Zone and Small Islands, the public has the rights to:</p> <ul style="list-style-type: none">a. obtain access to the waters which has been established by HP-3;b. obtain compensation resulting from the loss of access to the Coastal Zone and Small Islands Resources which has been their working field to fulfill the need resulting from the issuance of HP-3 in accordance with the existing laws and regulations;c. carry out activity in the management of Coastal Zone and Small Islands in accordance with existing customs (adat law) and not in contrary with existing laws and regulations;d. obtain benefit from the implementation of the Management of Coastal Zone and Small Islands;e. obtain information with regard to the Management of Coastal Zone and Small Islands;f. submit a report and claim to the authority for the loss he/she suffered related to the implementation of the Management of Coastal Zone and Small Islands;g. stated his/her objection to the management plan which has been announced at a particular period of time;h. report to the law enforcement officer of a pollution and/or damage to the Coastal Zone and Small Islands;i. submit a claim to the court of any problems related to the Coastal Zone and Small Islands; andj. obtain compensation. <p>(2) In the Management of Coastal Zone and Small Islands, the public has the obligation to:</p> <ul style="list-style-type: none">a. give information on the Management of Coastal Zone and Small Islands;b. guard, protect and maintain the preservation of Coastal Zone and Small Islands;c. submit report on the existence of danger, pollution, and/or environmental damage within the Coastal Zone and Small Islands;d. monitor the implementation of the plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands; and/or

<p>e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.</p>	<p>e. carry our the agreed program for the Management of Coastal Zone and Small Islands at the district level.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.</p> <p>(2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 61</p> <p>(1) The Government recognizes, respects and protect the rights of the <i>Adat</i> Community, Traditional Community, and Local Wisdom with regard to Coastal Zone and Small Islands which has been exploited for generations.</p> <p>(2) The recognition of the rights of the <i>Adat</i> Community, Traditional Community, and Local Wisdom as is stipulated in paragraph (1) shall be used as a guidance in the sustainable Management of Coastal Zone and Small Islands.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Article 62</p> <p>(1) The public has the same opportunity to participate in the planning, implementation, and control of the Management of Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(2) Provision on public participation in the Management of Coastal Zone and Small Islands as is stipulated in paragraph (1) shall be further regulated by a Minister Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.</p> <p>(3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan keputusan; b. pelaksanaan pengelolaan; c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah; d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup; e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya 	<p style="text-align: center;">CHAPTER XII PUBLIC EMPOWERMENT</p> <p style="text-align: center;">Article 63</p> <p>(1) The Government and the Local Government has the obligation to empower the public in order to improve their prosperity.</p> <p>(2) The Government has the obligation to promote public business activities through various activities in the field of efficient and effective Management of Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(3) In an effort to empower the public, the Government and the Local Government materialize, grow, and improve consciousness and responsibility in the:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. decision making; b. implementation of management; c. partnership between the public, the industry and the Government/Local Government; d. development and implementation of national policy in the field of living environment; e. development and implementation of preventive and proactive efforts to prevent the degeneration of the

<p>tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;</p> <p>g. penyediaan dan penyebaran informasi lingkungan; serta</p> <p>h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>carrying and accomodating capacities of the Coastal Zone and Small Islands;</p> <p>f. the utilization and development of environment friendly technology;</p> <p>g. providing and disseminating environmental information; and</p> <p>h. rewarding all person who has given commendable services in the field of the Management of Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(4) Provisions on the guideline for Public Empowerment shall be further regulated with a Minister Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER XIII SETTLEMENT OF DISPUTES</p> <p style="text-align: center;">Article 64</p> <p>(1) The settlement of disputes in the management of Coastal Zone and Small Islands shall be settled through litigation or out of court.</p> <p>(2) The settlement of disputes out of court as is stipulated in paragraph (1) is not valid for criminal acts relating to the Management of Coastal Zone and Small Islands under this Law.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.</p> <p>(4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.</p>	<p style="text-align: center;">Article 65</p> <p>(1) The settlement of disputes out of court shall be carried out by the disputing parties in accordance with existing laws and regulations.</p> <p>(2) The settlement of disputes out of court shall be carried out to reach an agreement on the type and amount of compensation and/or on particular action to prevent the occurrence or recurrence of substantial impact as a result of the non-implementation of the Management of Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(3) In the settlement of disputes out of court as is stipulated in paragraph (1) third party services may be employed, whether of those that have or do not have decision-making competence to assist in the settlement of disputes.</p> <p>(4) The agreement derived from the settlement of disputes out of court shall be put in writing and is binding to the parties.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar</p>	<p style="text-align: center;">Article 66</p> <p>(1) All persons and/or those responsible for illegal activities and resulted in the destruction of Coastal Zone and Small Islands as is stipulated in this Law has the obligation to pay compensation to the</p>

<p>ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>(2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.</p> <p>(4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (<i>dwangsom</i>) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.</p>	<p>State and/or carry out particular action based on court decisions.</p> <p>(2) Particular action as is stipulated in paragraph (1) is the obligation to carry out rehabilitation and/or recovery of the condition of the Coastal Zone and Small Islands.</p> <p>(3) Agent of destruction as is stipulated in paragraph (1) is under the obligation to pay rehabilitation costs of Coastal Zone and Small Islands environment to the State.</p> <p>(4) Besides the burden of an obligation to carry out particular acts as is stipulated in paragraph (2), the judge may decide on property seizure and the amount of fine to secure payment (<i>dwangsom</i>) for each day of failure to pay.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.</p> <p>(2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. peperangan; c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (<i>force majeure</i>); atau d. tindakan pihak ketiga. <p>(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.</p>	<p style="text-align: center;">Article 67</p> <p>(1) All persons and/or those responsible for action for the management of Coastal Zone and Small Islands, shall directly and immediately at the time the pollution and/or destruction occurs, be responsible to fulfill the obligation to give compensation resulting from his/her act.</p> <p>(2) Manager of Coastal Zone and Small Islands may be exempted from the obligation to pay compensation as is stipulated in paragraph (1) if he/she can prove that the pollution and/or destruction of the Coastal Zone and Small Islands environment is a result of any of the following grounds:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. natural disaster; b. war; c. <i>force majeure</i>; or d. act of a third party. <p>(3) In cases where there is intentional harm by a third party as is stipulated in paragraph (2) letter d, the third party is liable to pay compensation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIV GUGATAN PERWAKILAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER XIV CLASS ACTION</p> <p style="text-align: center;">Article 68</p> <p>The Public has the right to bring a class action through a court in accordance with existing laws and regulations.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.</p> <p>(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional; b. berbentuk badan hukum; c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. <p>(3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 69</p> <p>(1) Within the framework of the implementation of liability in the Management of Coastal Zone and Small Islands, community organization have the right to bring class action for the purpose of preserving the environmental functions.</p> <p>(2) The community organization as is stipulated in paragraph (1) has to meet the requirements of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. is an official organization in that area or a national organization; b. is a legal entity; c. has a statute which explicitly stated the purpose of its establishment is for the preservation of the environment; and d. has carried out activities in accordance with its statute and by-laws. <p>(3) the right to bring a claim as is stipulated in paragraph (1) is limited to a claim to carry out certain acts without any claim for compensation except remuneration for any cost or expenditure which is actually spent.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan 	<p style="text-align: center;">CHAPTER XV THE INVESTIGATION</p> <p style="text-align: center;">Article 70</p> <p>(1) Besides the investigating officer of the State Police of the Republic of Indonesia, particular civil servant officers whose scope of mandate and responsibility in the field of Management of Coastal Zone and Small Islands, may be given a special competence as investigator as is stipulated in the Law on Criminal Procedure.</p> <p>(2) The particular civil servant/officer as is stipulated in paragraph (1) is the civil government investigators.</p> <p>(3) The civil government investigators as is stipulated in paragraph (2) has the competence to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. receive a report or complaint from a person of an existence of crime in marine affairs and fisheries within the Coastal Zone and Small Islands; b. carry out inspection on the credibility of the report or information on the existence of crime relating to the Management of Coastal Zone and Small Islands; c. summon a person for examination and inspection as a witness or a suspect in a crime relating to the Management of Coastal Zone and Small Islands; d. inspect the facilities of the Coastal Zone and discontinue instruments that is suspected to have been used for crime relating to the Management od

<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;</p> <p>f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;</p> <p>h. melakukan penghentian penyidikan; dan</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.</p> <p>(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Coastal Zone and Small Islands;</p> <p>e. confiscate and/or seize any substance or instruments used for crime relating to the Management of Coastal Zone and Small Islands as evidence;</p> <p>f. bring the necessary Experts in relation to crime in the Management of Coastal Zone and Small Islands;</p> <p>g. write and sign investigation report;</p> <p>h. stop the investigation; and</p> <p>i. carry other measures according to the law.</p> <p>(4) The civil government investigators shall inform the commencement of investigation to the investigation officer of the State Police of the Republic of Indonesia.</p> <p>(5) The civil government investigators shall submit the result of his/her investigation to the public prosecutor through the investigation officer of the State Police of the Republic of Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER XVI ADMINISTRATIVE SANCTION</p> <p style="text-align: center;">Article 71</p> <p>(1) Violation of the requirements as is stipulated in the HP-3 is punishable by an administrative sanction.</p> <p>(2) The administrative sanction as is stipulated in paragraph (1) is a warning, temporary withdrawal of the permit, administrative fine/penalty, and or removal of HP-3.</p> <p>(3) Further provisions on the administrative fine/penalty as is stipulated in paragraph (2) shall be regulated by a Minister Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:</p>	<p style="text-align: center;">Article 72</p> <p>(1) In cases where the program for the Management of Coastal Zone and Small Islands is not carried out consistent with the planning documents, the Government may discontinue and/or withdraw the incentive that has been given to the Local Government, the businessman, and the Community that has received Accreditation.</p> <p>(2) The Local Government, the businessman, and the Community has the obligation to improve the inconsistency between the management program and the planning documnt as is stipulated in paragraph (1).</p> <p>(3) In cases where the Local Government, the businessman, and the Community do not carry out the improvement regarding the inconsistency in paragraph (2), The Government may:</p>

<p>a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau b. pencabutan tetap Akreditasi program.</p>	<p>a. freeze temporarily the assistance through the Accreditation; and/or b. permanently withdraw the Accreditation program.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g; c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h; d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i. e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j. f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k. g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l. h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1). <p>(2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER XVII CRIMINAL PROVISIONS</p> <p style="text-align: center;">Article 73</p> <p>(1) Punishable with imprisonment at least for 2 (two) years and at a maximum of 10 (ten) years and a fine of at least Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) and at a maximum of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah), all person who intentionally :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. carry out the mining of coral reefs, pick up coral reef from the conservation Area, use explosives and toxic substances, and/or other means which resulted in the damage to the coral reef ecosystem as is stipulated in Article 35 letter a, b, c and d; b. use means and methods which damage the mangrove Ecosystem, carry out the conversion of the mangrove Ecosystem, cut off mangrove for use on industrial activities and residential area, and/or other activities as is stipulated in Article 35 letter e, f and g; c. use of means and methods which is damaging the sea-grass beds as is stipulated in Article 35 letter h; d. carry out sand mining as is stipulated in Article 35 letter i; e. carry out oil and gas mining as is stipulated in Article 35 letter j; f. carry out mineral mining as is stipulated in Article 35 letter k; g. carry out physical construction which can be damaging as is stipulated in Article 35 letter l; h. do not carry out natural and/or man-made disaster mitigation within the Coastal Zone and Small Islands resulting in the disaster, or intentionally carry out activities which may result in the disaster vulnerability as is stipulated in Article 59 paragraph (1). <p>(2) If the damage as is stipulated in paragraph (1) is caused by negligence, it is punishable with a maximum of 5 (five) years imprisonment and a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:</p> <p>a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau</p> <p>b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Article 74</p> <p>Punishable with a maximum of 6 (six) months imprisonment or a fine of a maximum of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah), all persons which because of his/her negligence:</p> <p>a. do not fulfill the obligation for rehabilitation as is stipulated in Article 32 paragraph (1); and/or</p> <p>b. do not fulfill the obligation for reclamation as is stipulated in Article 34 paragraph (2).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:</p> <p>a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau</p> <p>b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).</p>	<p style="text-align: center;">Article 75</p> <p>Punishable with a maximum of 6 (six) months imprisonment or a fine of a maximum of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah), all persons which because of his/her negligence:</p> <p>a. carry out business undertaking within the Coastal Zone as is stipulated in Article 21 paragraph (1); and/or</p> <p>b. do not fulfill the obligation as is stipulated in Article 21 paragraph (4).</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER XVIII TRANSITIONAL PROVISIONS</p> <p style="text-align: center;">Article 76</p> <p>Program for the Management of Coastal Zone and Small Islands and the agency which has been designated for its execution is still valid and shall carry out its competence as long as it is not in contradiction with this Law.</p> <p style="text-align: center;">Article 77</p> <p>Each agency associated with the Management of Coastal Zone and Small Islands shall carry out and integrate their mandates, functions and jurisdictions in conformity with this Law.</p> <p style="text-align: center;">Article 78</p> <p>All existing laws and regulations relevant to the Management of Coastal Zone and Small Islands, as long as it is not in contradiction with this Law, shall be in force until the enactment of implementing regulations based on this Law.</p>

<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.b. Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.	<p style="text-align: center;">CHAPTER XIX FINAL PROVISIONS</p> <p style="text-align: center;">Article 79</p> <p>The implementing regulations of this Law shall be enacted, at the latest :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Government Regulations mandated by this Law shall be ready at the latest 12 (twelve) months after the entry into force of this Law.b. President Regulations mandated by this Law shall be ready at the latest 6 (six) months after the entry into force of this Law.c. Minister Regulations by this Law shall be ready at the latest 3 (three) months after the entry into force of this Law.
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta, pada tanggal 17 Juli 2007</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2007</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ANDI MATTALATTA</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84</p>	<p style="text-align: center;">Article 80</p> <p>This Law shall enter into force at the date it is enacted.</p> <p>For public knowledge, it is hereby ordered the enactment of this Law by its promulgation in the State Gazette of the Republic of Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Enacted in Jakarta On the 27th of July 2007</p> <p style="text-align: center;">THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p> <p>Promulgated in Jakarta On the 27th of July 2007</p> <p style="text-align: center;">MINISTER FOR LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ANDI MATTALATTA</p> <p>THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2007 NUMBER 84</p>

<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</p>	<p style="text-align: center;">ELUCIDATION TO LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 27 OF 2007 CONCERNING MANAGEMENT OF COASTAL ZONE AND SMALL ISLANDS</p>
<p>I. UMUM</p> <p>1. Dasar Pemikiran</p> <p>Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti <i>sasi</i>, <i>mane'e</i>, <i>panlima laot</i>, <i>awig-awig</i>, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya nonhayati disubstitusi dengan sumber daya lain.</p>	<p>I. GENERAL</p> <p>1. Basic Reasoning</p> <p>Within this decade there is a tendency that the vulnerable Coastal Zone and Small Islands has suffered destruction resulting from human activities in the exploitation of its resources or from natural disaster. In addition to that, the accumulation of various exploitation activities of partial/sectoral characteristics within the Coastal Zone and Small Islands, or impacts from other activities at the upper course of the coastal zone supported by existing laws and regulations often resulted in the destruction of the Resources of the Coastal Zone and Small Islands. Existing laws and regulations are more oriented toward the exploitation of the Resources of the Coastal Zone and Small Islands without taking into account the preservation of that resources. Meanwhile, there is relatively lack of awareness on the strategic value of the sustainable, integrated and community based management of Coastal Zone and Small Islands. Lack of respect on the rights of the local/<i>Adat</i> community in the management of the Resources of the Coastal Zone and Small Islands such as <i>sasi</i>, <i>mane'e</i>, <i>panlima laot</i>, <i>awig-awig</i>, and a limited space for public participation in the management of the Resources of the Coastal Zone and Small Islands shows that the principle of harmony in the management of coastal zone and small islands has not been integrated with development activities from various agencies and local intitutions. Such system of management of coastal zone has not been able to eliminate the factors causing the damage and has not provide opportunity for the natural restoration of the living or non-living resources, substituted by other resources.</p>
<p>Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan</p>	<p>Therefore, the uniqueness of the coastal zone and small islands which is vulnerable to the development of conflict and limited access for utilization by the coastal and small islands community, has to be properly managed in order to control the impact of</p>

<p>sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>human activities and part of the coastal zone being reserved for conservation. The public has to be encouraged to properly manage their coastal zones and those that have succeeded should be given incentives, while those that brought damage should be imposed with sanctions. The norms for the Management of Coastal Zone and Small Islands is formulated within the scope of planning, utilization, management, organization and control, taking into account norms as is regulated in other laws and regulations, such as Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia 2007 No. 68, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia 2007 No. 4725). The norms for the Management of Coastal Zone and Small Islands which is going to be included is concentrated on legal norms which has not been regulated in the system of existing laws and regulations, or has a specific character compared with general regulations which has been enacted. That norms will give roles to the Government, the public and the private sector as stakeholders, be it local, national as well as international stakeholders by means of a system of integrated management of areas. In conformity with the spirit of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a law abiding State, the development of a system for the Management of Coastal Zone and Small Islands as part of environmentally sustainable development which has to be given clear, explicit and comprehensive legal basis, to guarantee legal certainty for efforts in the management of Coastal Zone and Small Islands. The legal basis is founded by <i>Pancasila</i> (the Five Principles of State Philosophy) and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.</p>
<p>2. Tujuan penyusunan Undang - Undang ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait; b. membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta 	<p>2. The purpose for the formulation of this Law is:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to prepare for regulation at the level of a Law on the Management of Coastal Zone and Small Islands, particularly relating to the planning, utilization, public rights and access, conflict handling, conservation, disaster mitigation, coastal reclamation, rehabilitation of damaged coastal zones, and the implementation of relevant international conventions; b. to build synergy and mutual strengthening of inter-governmental agencies be it at the central or local levels relevant to the management of the coastal zone to build a harmonized inter-agency cooperation and to prevent and lessen conflicts in the exploitation and conflict of jurisdiction among activities within the coastal zone and small islands; and

<p>c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.</p>	<p>c. to give legal certainty and protection and improve the level of coastal zone and small islands community's prosperity through the formulation of regulations which can guarantee access and rights to the coastal community and other interested communities, including the industry.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Undang-Undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut:</p>	<p>3. The scope This Law shall be in force within the Coastal Zone and Small Islands which covers the junction between the influences of marine and land areas, landward covers the district administrative area and seaward is 12 (twelve) nautical miles measured from the coastline toward the high seas and/or toward the archipelagic waters. The scope of this Law in general is divided into three parts of planning, management, organization and control, with the following description:</p>
<p>a. Perencanaan Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (<i>Integrated Coastal Management</i>) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.</p>	<p>a. Planning Planning is carried out through an Integrated Coastal Zone and Small Islands Management approach, which integrates various planning formulated by various central and local agencies and resulting in harmony and mutual strengthening in its exploitation. The integrated Management of Coastal Zone and Small Islands is an approach providing for directions in the sustainable utilization of Coastal Zone and Small Islands Resources through the integration of various development plans from different levels of government, between marine and land ecosystems, and between science and management. The Plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands is carried out to harmonize economic development interests with the preservation of Coastal Zone and Small Islands Resources while taking into account the characteristic and uniqueness of the areas. The integrated plan is an effort in stages and is programmed for the optimum utilization of the Coastal Zone and Small Islands Resources, to enable it to generate sustainable economic benefit for public prosperity. The plan is accompanied with efforts to control the impact of sectoral development which may happen, and to safeguard the preservation of resources. The planning for Coastal Zone and Small Islands is divided into four stages : (i) strategic plan; (ii) zoning plan; (iii) management plan; and (iv) action plan.</p>

<p>b. Pengelolaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dan pengusaha perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait. 2. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri. 3. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik. 4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 	<p>b. The Management The management of the Coastal Zone and Small Islands includes the stages for regulation policy, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The exploitation and business of the coastal and small islands' waters shall be carried out through the issuance of permits or license for exploitation and right to undertake business in the coastal waters (HP-3). License for exploitation is issued in accordance with laws and regulations and the relevant agencies competences. 2. Right to Undertake Business in the Coastal Zones (HP-3) is issued for the aquaculture area or maritime zone for public utilization except those that has been regulated separately. 3. The regulation for the Management of Coastal Zone and Small Islands begin from the planning, utilization, implementation, organization, control, recognition of public rights and empowerment, jurisdiction or authority, institutions, up to the prevention and settlement of conflicts. 4. The management of small islands is carried out within a cluster of islands taking into account ecological, economical, and socio-cultural relevances in one bio-eco region with the main island or other islands as the center of economic growth.
<p>Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.</p>	<p>Coastal Zone and Small Islands Resources which is relatively rich often becomes the center for economic growth, and are densely populated. However, most of its population are relatively poor and this poverty trigger pressure on Coastal Zone and Small Islands Resources which is their source of living. If neglected, it will bring an implication in the increasing destruction of the coastal and small islands ecosystems. In addition to that, there is still the tendency that industrialization and economic development within Coastal Zone and Small Islands often resulted in the marginalization the local population. Therefore there is a need for principles of public empowerment.</p> <p>The Coastal Zone and Small Islands which is vulnerable to changes need to be protected through management so that it can be exploited to fulfill the community habitation and livelihood needs. Therefore, there is a need for a management policy to create a balance in the level of exploitation of the Coastal Zone and Small Islands Resources for economic purposes without depriving the interests of future generations through the development of Conservational Areas and Coastal Belt.</p>

<p>c. Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;2. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;3. memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan. <p>4. Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti:</p> <ol style="list-style-type: none">a. undang-undang yang mengatur perikanan;b. undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;c. undang-undang yang mengatur kehutanan;d. undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi;e. undang-undang yang mengatur penataan ruang;f. undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;g. undang-undang yang mengatur pelayaran;h. undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;i. undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria;j. undang-undang yang mengatur perairan;k. undang-undang yang mengatur kepariwisataan;l. undang-undang yang mengatur perindustrian dan perdagangan;m. undang-undang yang mengatur sumber daya air;n. undang-undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional; dano. undang-undang yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.	<p>c. Organization and Control Organization and control is carried out :</p> <ol style="list-style-type: none">1. to know when there is a deviation in the implementation of the strategic plan, zoning plan, and the implication of the deviations to the change in the quality of the coastal ecosystem.2. encourage the exploitation of Coastal Zone and Small Islands Resources in conformity with the management plan for its coastal zones.3. give sanction to the violator, whether an administrative sanction such as of invalidating the license or withdrawal of rights, civil sanction such as compensation, or criminal sanction in the form of apprehension or imprisonment. <p>4. This Law on the Management of Coastal Zone and Small Islands is a basis for harmonization with provisions of other laws and regulations. This Law has a complementary relation with other laws and regulations, such as:</p> <ol style="list-style-type: none">a. law on fisheries;b. law on local autonomy;c. law on forestry;d. laws on mining, oil and gas;e. law on spatial planning;f. law on the management of the living environment;g. law on shipping or sea transportation;h. law on the conservation of natural resources and its ecosystem;i. the basic provisions on agrarian law;j. law on water works;k. law on tourism;l. law on industry and trade;m. law on water resources;n. law on the system for national development planning; ando. law on arbitration and alternative dispute resolution.
--	--

<p>Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.</p>	<p>It is expected that this Law can be used as the basis for the development of coastal zone and small islands by various relevant agencies. Therefore, it is hoped that it can prevent overlapping of jurisdiction and conflict of interests.</p>
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>	<p>II. ARTICLE BY ARTICLE</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 1</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat.</p> <p>Dalam implemetasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi.</p> <p>Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan.</p>	<p>Article 2</p> <p>The scope of this Law includes the coastal zone, the maritime space that is still influenced by activities at land, and terrestrial space that is still influenced by the sea; and the Small Islands and its surrounding waters which form as a unity and has huge potentials, that its exploitation is based on the resources, environment and the community.</p> <p>In its implementation, the provincial jurisdiction has been established seaward to be 12 (twelve) nautical miles measured from the coastline as is determined by Law No. 32 of 2004 on the Local Autonomy (State Gazette 2004 No. 125, Additional State Gazette No. 4437), while landward it is to coincide with the outer limit of the district.</p> <p>The jurisdiction of the regency/municipality seaward is one third that of the provincial jurisdiction as is established by Law No. 32 of 2004 on the Local Autonomy, while landward is determined to coincide with the outer limit of the district.</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Huruf a</p> <p>Asas keberlanjutan diterapkan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir; 2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan 3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus 	<p>Article 3</p> <p>Letter a</p> <p>The principle of sustainability is applied to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the exploitation of resources shall not exceed the regeneration capacity of the living resources or the pace of innovative substitution of the living resources of the coastal zone; 2. the exploitation of coastal zone resources at present shall not forfeit (in quality and quantity) the interests of future generations of coastal zone resources; and 3. the exploitation of resources with unknown impact shall be carried out

<p>dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.</p>	<p>carefully and shall be supported with adequate scientific research.</p>
<p>Huruf b.</p> <p>Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.</p>	<p>Letter b</p> <p>The principle of consistency is consistency from various agency and levels of government, and the planning process, its implementation, organization and control, in the implementation of the program for the Management of Coastal Zone and Small Islands that has received accreditation.</p>
<p>Huruf c.</p> <p>Asas keterpaduan dikembangkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan 2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 	<p>Letter c</p> <p>The principle of integration is developed through:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the integration of policy with various agency's planning horizontally and vertically between the Government and the local government; and 2. to integrate the terrestrial ecosystem wirh the marine ecosystem based on the scientific and technological feed back to assist in the decision making process for the Management of Coastal Zone and Small Islands
<p>Huruf d</p> <p>Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>Letter d</p> <p>The principle of legal certainty is needed to guarantee legal certainty that regulates the management of coastal zone and small islads resources clearly and understandably and is respected by all stakeholders, and the decision taken is based on accountable mechanism and means and do not marginalized the coastal zone and small islands' community</p>
<p>Huruf e</p> <p>Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	<p>Letter e</p> <p>The principle of partnership is an agreement for cooperation among the interested parties relating to the Management of Coastal Zone and Small Islands</p>
<p>Huruf f</p> <p>Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.</p>	<p>Letter f</p> <p>The principle of equality is aimed at the economic benefit of the coastal zone and small islands resources which can be enjoyed by a greater part of the community.</p>

<p>Huruf g</p> <p>Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; 2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; 4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil. 	<p>Letter g</p> <p>The principle of public participation means:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. to give the coastal zone and small islands community a role in the planning, implementation, up to the level of control and organization; 2. possess open information for the government policy and have sufficient access to utilize the coastal zone and small islands resources; 3. guarantee the existence of people representation vote on decision making; 4. utilize the resources fairly
<p>Huruf h</p> <p>Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.</p>	<p>Letter h</p> <p>The principle of transparency means there is a transparency for the public to obtain true, honest and non-discriminative information regarding the Management of Coastal Zone and Small Islands, from the planning stage, utilization, organization up to the controlling stage, while taking into account the protection of the right to privacy, community and State's confidentiality</p>
<p>Huruf i</p> <p>Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>Huruf j</p> <p>Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Letter i</p> <p>The principle of decentralization is the delegation of governance authority from the Government to the autonomous local government to regulate and in charge of governmental business in the Management of Coastal Zone and Small Islands</p> <p>Letter j</p> <p>The principle of accountability is meant that the management of coastal zone and small islands shall be carried out in a transparent and accountable manner.</p>
<p>Huruf k</p> <p>Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>Letter k</p> <p>The principle of equality is the principle that hold on to truth, impartiality, not taking sides, and non-depotism in the utilization of coastal zone and small islands resources</p>

<p>Pasal 4</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 4</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 5</p> <p>Dua faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ialah:</p> <p>a. interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perikanan destruktif, reklamasi pantai, pemanfaatan mangrove dan pariwisata bahari; dan</p> <p>b. proses-proses alamiah seperti abrasi, sedimentasi, ombak, gelombang laut, arus, angin, salinitas, pasang surut, gempa tektonik, dan tsunami.</p>	<p>Article 5</p> <p>Two factors that influenced the sustainability of coastal zone and small islands resources, is :</p> <p>a. the interaction of man in the utilization of resources and environmetal services, directly or indirectly, such as the development within Coastal Zone and Small Islands, destructive fisheries, coastal reclamation, utilization of mangrove and marine tourism; and</p> <p>b. natural processes such as abrasion, sedimentation, waves, sea waves, currents, wind, salinity, tides, tectonic quake, and <i>tsunami</i>.</p>
<p>Pasal 6</p> <p>Integrasi antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen merupakan pengelolaan terpadu yang didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang valid untuk memberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pengambil putusan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya, kelembagaan, dan biogeofisik lingkungan setempat.</p>	<p>Article 6</p> <p>The integration between science and the principles of management is an integrated management based on data input and valid scientific information to provide various alternatives and recommendations for the desion-makers taking into account the social, economic, and cultural conditions and characteristics, institutions, and local environmental biogeofisic.</p>
<p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman dilakukan melalui konsultasi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 7</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (3)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (4)</p> <p>The inclusion of the public based on principles, standard, and guidelines is carried out through public consultations and/or <i>Adat</i> consensus, be it formal or non-formal</p> <p>Paragraph (5)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1)</p>	<p>Article 8</p> <p>Paragraph (1)</p>

<p>RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan isu Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang aktual, seperti halnya degradasi sumber daya, masyarakat tertinggal, konflik pemanfaatan dan kewenangan, bencana alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan jaminan kepastian hukum guna mencapai tujuan yang ditetapkan.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Kepentingan pusat dan daerah merupakan keterpaduan dalam bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti pertahanan negara, wilayah perbatasan negara, kawasan konservasi, alur pelayaran internasional, Kawasan migrasi ikan dan kawasan perjanjian internasional di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>The provincial and regency/municipality RSWP-3-K is formulated based on the the actual issue of the Management of Coastal Zone and Small Islands, such as the degradation of resources, underdevelop community, conflicts between exploitation and jurisdiction, natural disaster within Coastal Zone and Small Islands, and the assurance of legal certainty in order to reach the goals that has been determined.</p> <p>Paragraph (2)</p> <p>The interests of the central and local government is an integration in the Management of Coastal Zone and Small Islands such as national defence, national boundary areas, conservation areas, international navigational routes, fisheries migration areas, and areas of international agreement in the field of maritime affairs and fisheries.</p> <p>Paragraph (3)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 9</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yaitu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p>	<p>Article 9</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (2)</p> <p>The provincial and regency/municipality RZWP-3-K is part of the spatial planning of the provincial or regency/municipality territory in accordance with Article 5 paragraph (4) and (5) of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning.</p> <p>Paragraph (3)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (4)</p> <p>The duration of the applicability of the provincial or regency/municipality RZWP-3-K is in conformity with the duration of the Spatial Planning of the Provincial Territory and the Spatial Planning of the Regency/Municipality, that is 20 (twenty) years, as is regulated in Article 26 paragraph (4) of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning.</p>

<p>Ayat (5)</p> <p>RZWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi sejalan dengan Pasal 23 ayat (3), dan RZWP-3-K Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p>	<p>Paragraph (5)</p> <p>The provincial RZWP-3-K which is established by a Provincial Regulation shall be in conformity with Article 23 paragraph (3), and the regency/ municipality RZWP-3-K which is established by a Regency/Municipality Regulation shall be in conformity with Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning.</p>
<p>Pasal 10</p> <p>RZWP-3-K Provinsi mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p>	<p>Article 10</p> <p>The Provincial RZWP-3-K covers the planning for land area of a coastal district seaward to waters of a maximum 12 nautical miles measured from the coastline, to the high seas and/or archipelagic waters in a stretch of interrelated space between land ecosystem and its maritime waters. The scale for the map of the Zoning Plan is adjusted with the level of accuracy of the map of the provincial spatial planning, in accordance with Article 14 paragraph (7) of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning.</p>
<p>Huruf a</p> <p>Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan.</p>	<p>Letter a</p> <p>Public utilization area which is equivalent to aquaculture area according to Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning is an area to be used for of economic and socio-cultural purposes, such as fisheries activities, sea transportation facilities, maritime industry, tourism, human settlement, and mining.</p>
<p>Kawasan Konservasi dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p>	<p>The Conservation Area with its primary function to protect the preservation of Coastal Zone and Small Islands resources which is equivalent to protected area under Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning.</p>
<p>Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.</p>	<p>Sea-lanes is waters which is being utilized, among others, as navigational routes, placement of underwater cable and pipelines, and the migration of marine biotas.</p>
<p>Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteria; batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.</p>	<p>Particular National Strategic Area take into account the following criterias: national sovereignty maritime boundaries; areas which geo-politically, national security and defence, sites of world heritage; outermost small islands which is used as base points and/or habitat for local and rare biota.</p>
<p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter b</p> <p>Sufficiently clear</p>

<p>Huruf c</p> <p>Pemanfaatan ruang laut antara lain untuk kegiatan pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, industri, dan permukiman.</p>	<p>Letter c</p> <p>The utilization of marine space among others, are for port, fisheries, aquaculture, tourism, industry and human settlement activities.</p>
<p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter d</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Ayat (1)</p> <p>RZWP-3-K kabupaten/kota mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3 (sepertiga) wilayah perairan kewenangan provinsi. Pemeringian perencanaan pada tiap-tiap zona, dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p>	<p>Article 11</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>The regency/municipality RZWP-3-K covers land planning area of the coastal district up to 1/3 (one third) of the area under the provincial jurisdiction. Detailed planning for each zone, and the level of accuracy of the scale of the plan's map/chart is adjusted with the spatial planning of the regency/municipality as is regulated by Article 14 paragraph (5), (6) and (7) of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 12</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Penggunaan sumber daya yang diizinkan merupakan penggunaan sumber daya yang tidak merusak ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penggunaan sumber daya yang dilarang adalah penggunaan sumber daya yang berpotensi merusak Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	<p>Article 12</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Letter a</p> <p>Permissible exploitation of resources is resource exploitation which is non-destructive to the Coastal Zone and Small Islands ecosystems. Prohibited exploitation of resources is the exploitation of resources which has the destructive potential to the Coastal Zone and Small Islands Ecosystems.</p>
<p>Huruf b</p> <p>Karakteristik Wilayah Pesisir merupakan daerah yang memiliki produktivitas hayati dan intensitas pembangunan yang tinggi serta memiliki perubahan sifat ekologi yang dinamis.</p> <p>Pulau-Pulau Kecil merupakan pengertian yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, baik secara fisik, ekologis, sosial, budaya, maupun ekonomi dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. terpisah dari pulau besar; b. sangat rentan terhadap perubahan</p>	<p>Letter b</p> <p>The characteristic of the Coastal Zone is an area that has high living resources productivity and development intensity, and has a dynamic change of ecological character.</p> <p>Small Islands is an integrated terminology one with the other, be it physical, ecological, social, cultural or economic with the following characteristics:</p> <p>a. separated from large islands; b. vulnerable toward changes caused by</p>

<p>yang disebabkan alam dan/atau disebabkan manusia;</p> <p>c. memiliki keterbatasan daya dukung pulau;</p> <p>d. apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang khas;</p> <p>e. ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun kontinen.</p>	<p>nature and/or by man;</p> <p>c. have limited island's carrying capacity;</p> <p>d. if inhabited, the inhabitants has special social and cultural condition;</p> <p>e. the local economic development is dependent on the economic development outside of the islands, whether the mother island or the continent.</p>
<p>Huruf c</p> <p>Hasil-hasil konsultasi publik sesuai dengan kesepakatan yang transparan, demokratis, dan tercatat dalam dokumen konsultasi publik.</p>	<p>Letter c</p> <p>The outcomes of public consultations is equivalent to transparent and democratic agreement, and is recorded in the public consultation documents.</p>
<p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter d</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter e</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 13</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 13</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Article 14</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya disampaikan secara efektif melalui jalur komunikasi yang tersedia.</p>	<p>Paragraph (3)</p> <p>Inputs, responses, suggestions, and corrections from various primary stakeholders, Government agencies, provincial government, and regency/municipality governments within its territory may be submitted effectively through available means of communication.</p>

<p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (4)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (5)</p> <p>Pemerintah provinsi wajib melakukan perbaikan serta memublikasikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan yang diterima dari pihak penanggap.</p>	<p>Paragraph (5)</p> <p>The provincial government has the obligation to improve and publish the final document of plan for the Management of Coastal Zone and Small Islands, based on the inputs, responses, and suggestions for improvement obtained from the respondents.</p>
<p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (6)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (7)</p> <p>Dalam hal dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mendapat tanggapan dan/atau saran sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini maka dokumen tersebut dianggap final.</p>	<p>Paragraph (7)</p> <p>In cases where the final document of plan for the management of coastal zone and small islands do not receive any response and/or recommendation up to the time limit determined by this Law, then the document is considered to be final.</p>
<p>Pasal 15</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Data dan informasi yang dimaksud bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terkini, dan sesuai kebutuhan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Publikasi resmi dimaksud antara lain melalui berita negara pada tingkat nasional, berita daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 15</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Data and information is meant to be accurate, accountable, contemporary, and in line with the need on coastal zone and small islands.</p> <p>Paragraph (2)</p> <p>The official publication is meant, among others, at the national level through State's Report (<i>Berita Negara</i>), Local news/report at the provincial and regency/municipality levels.</p> <p>Paragraph (3)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (4)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (5)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (6)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 16</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 16</p> <p>Sufficiently clear</p>

<p>Pasal 17</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 17</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 18</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 18</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 19</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 19</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 20</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Jaminan utang merupakan utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.</p>	<p>Article 20</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Loan guarantee is a loan where payment is assured by guarantee rights which can be in the form of existing obligation or which has been agreed in a particular amount; or an amount which can be determined at the time of application for the execution of gurantee rights is submitted, and can be determined on a basis of lending-borrowing agreement, or any other agreement which resulted in that lending-borrowing relationship.</p>
<p>Hak tanggungan yang melekat pada HP-3 merupakan hak jaminan yang dibebankan pada HP-3, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan HP-3, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.</p>	<p>The guarantee rights attached to HP-3 is security right which is burdened on HP-3, with or without oher things that is a unity with HP-3, for payment of particular loan, which gives a state of priority to particular creditor as against other creditors.</p>
<p>Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.</p>	<p>The guarantee rights can be issued for a loan derived from one legal relationship or one or more loans derived from several legal relationships.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (3)</p> <p>Letter a</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud ditelantarkan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang HP-3 dengan tidak berbuat sesuatu terhadap perairan pesisir selama tiga tahun berturut-turut.</p>	<p>Letter b</p> <p>What is meant by being neglected is an act by a possesor of an HP-3 by not doing anything toward the coastal zone for three consecutive years.</p>
<p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter c</p> <p>Sufficiently clear</p>

<p>Ayat (4)</p> <p>Pendaftaran HP-3 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengukuran, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang perairan, termasuk pemberian sertifikat HP-3.</p>	<p>Paragraph (4)</p> <p>The registration of HP-3 is a series of activities which is carried out continuously, sustainably, and in order by the Government, which covers measurement, processing, bookkeeping, and providing and maintain physical and juridical data, in the form of map/chart and a list of maritime zones, including the issuance of HP-3 certificate.</p>
<p>Pasal 21</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 21</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 22</p> <p>Suaka perikanan merupakan kawasan perairan tertentu baik air payau maupun air laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.</p> <p>Alur pelayaran merupakan bagian dari perairan baik alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.</p> <p>Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.</p> <p>Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan masyarakat antara lain untuk kepentingan kegiatan sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.</p>	<p>Article 22</p> <p>Fisheries sanctuary is a particular area of waters be it brackish waters or marine water with particular condition and characteristic as a place for protection or breeding of particular fish species, that functioned as protective area.</p> <p>Sea/navigation lane is part of waters natural or man-made, which from the aspects of depth, width, and other obstruction to navigation in considered to be safe for navigation.</p> <p>Port area is the working area of the port.</p> <p>Public coast is part of the public utilization area which has been used by the public, among others, for social, cultural, recreation-tourism, sport and economic activities.</p>
<p>Pasal 23</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 23</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 24</p> <p>Kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun yang diakibatkan oleh alam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Article 24</p> <p>Protected area is area that its existence has to be maintained from environmental destruction, be it of natural cause or as a result of human activities, to safeguard the unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.</p>
<p>Pasal 25</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 25</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 26</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 26</p> <p>Sufficiently clear</p>

<p>Pasal 27</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 27</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 28</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Menjaga kelestarian ekosistem pesisir meliputi upaya untuk melindungi gumuk pasir, estuari, lagoon, teluk, delta, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.</p>	<p>Article 28</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Letter a</p> <p>Preserving the coastal ecosystem includes all efforts to protect sandbanks, estuary, lagoon, bay, delta, mangrove, coral reef, and seagrass beds.</p>
<p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter b</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter c</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Huruf d.</p> <p>Situs budaya tradisional antara lain: tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman, dan tempat ritual keagamaan atau adat.</p>	<p>Letter d</p> <p>Traditional cultural sites are among others : location of sunken ships which has special archaeological-historical value, maritime historical sites, and place for religious rituals or custom (<i>adat</i>).</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (3)</p> <p>Letter a</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter b</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf d</p> <p>Ekosistem pesisir yang unik misalnya gumuk pasir di pantai selatan Yogyakarta, lagoon Segara Anakan, ekosistem pesisir kepulauan Derawan sebagai habitat peneluran penyu laut.</p>	<p>Letter c</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Letter d</p> <p>Unique coastal ecosystem is for instance sandbanks along the southern coastal areas of Yogyakarta, Segara Anakan lagoon, coastal ecosystem of the Derawan islands as habitat for the laying of turtle eggs.</p>
<p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (4)</p> <p>Sufficiently clear</p>

<p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (7)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (5)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (6)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (7)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 29</p> <p>Huruf a</p> <p>Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.</p>	<p>Article 29</p> <p>Letter a</p> <p>The nucleus zone is part of the protected Conservation Area of the Coastal Zone and Small Islands, which is intended for the protection of habitat and population of Coastal Zone and Small Islands Resources and its exploitation is limited only for research.</p>
<p>Huruf b</p> <p>Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.</p>	<p>Letter b</p> <p>Zone for limited utilization is part of Coastal Zone and Small Islands Conservation area where its utilization is only allowed for coastal aquaculture, eco-tourism, and traditional fisheries.</p>
<p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter c</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 30</p> <p>Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (1)</p>	<p>Article 30</p> <p>See elucidation for Article 50 paragraph (1)</p>
<p>Pasal 31</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 31</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 32</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 32</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Pengayaan sumber daya hayati dilakukan terhadap jenis-jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasi.</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>Letter a</p> <p>The enrichment of living resources is carried out for fish species that has depleted population.</p>
<p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter b</p> <p>Sufficiently clear</p>

Huruf c Cukup jelas	Letter c Sufficiently clear
Huruf d Cukup jelas	Letter d Sufficiently clear
Pasal 33 Cukup jelas	Article 33 Sufficiently clear
Pasal 34 Ayat (1) Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya.	Article 34 Paragraph (1) Reclamation in the coastal zone can only be carried out if the social and economic benefit derived is larger than the social and economic cost.
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas	Paragraph (2) Sufficiently clear Paragraph (3) Sufficiently clear
Pasal 35 Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pokoknya. Pemanfaatan secara tidak langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya.	Article 35 Direct utilization is activity of individual or corporate entity in the exploitation of part of the coastal zone and small islands for its main activities. Indirect exploitation is activity of individual or corporate entity in the exploitation of part of the coastal zone and small islands to support its main activities
Huruf a Yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang adalah pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industri dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil.	Letter a What is meant by coral reef mining is the intentional extraction of coral reef to be used for construction, aquarium ornament, handicraft, coral flower (ornament), industry and other interests that resulted in the coverage of live reef of less than 50% (fifty percent) of the extracted area.
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas	Letter b Sufficiently clear Letter c Sufficiently clear

<p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter d</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Letter e</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Letter f</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Huruf g</p> <p>Penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi.</p>	<p>Letter g</p> <p>The cutting off mangrove in the area that is already allocated for in the Management plan for Coastal Zone and Small Islands for fish-culture is allowed as long as it fulfils the conservation rules.</p>
<p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf i</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter h</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Letter i</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 36</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pengawasan dengan wewenang kepolisian khusus adalah pengawas yang melakukan kegiatan patroli dan tugas polisional lainnya, di luar tugas penyidikan.</p> <p>Pengawas merupakan pegawai negeri sipil di instansi yang membidangi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	<p>Article 36</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Control (controller/supervisor) by special police jurisdiction is the supervisor/controller which carry out patrol activities and other police duty, outside investigation duty.</p> <p>The supervisor/controller are civil servants/government officials of the agency in charge of the Management of Coastal Zone and Small Islands.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Pengawas atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu melakukan patroli secara aktif, tetapi tetap menampung laporan dari masyarakat tentang pelanggaran dan kegiatan perusakan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (3)</p> <p>The supervisor/controller or particular government investigator (PPNS) conduct active patrols, however still accept reports from public regarding violations and destructive activities within coastal zone and small islands through a community based controlling system.</p> <p>Paragraph (4)</p> <p>Sufficiently clear</p>

<p>Ayat (5)</p> <p>Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir; b. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; serta c. menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana. 	<p>Paragraph (5)</p> <p>Control and organizational activities are carried out :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to know when there is a deviation in the implementation of the strategic plan, zoning plan, management plan, and the implication of that deviation to the quality change of the coastal ecosystem; b. encourage so that exploitation of resources within coastal zone and small islands is in conformity with the management plan of the coastal zone; and c. enforce law by giving sanction to the violators in the forms of administrative, civil and/or criminal sanctions.
<p>Ayat (6)</p> <p>Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengelolaan dengan berdasarkan adat budaya dan praktik-praktik yang lazim atau yang telah ada di dalam masyarakat, b. pelaksanaan pengelolaan dengan memunculkan kreativitas dan kemandirian dalam hal jumlah dan variasi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tempat-tempat yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan, sehingga wilayah kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat diperluas. c. penyelesaian konflik mengenai aturan-aturan baru yang sengaja dibuat oleh masyarakat karena kebutuhan sendiri ataupun aturan-aturan yang difasilitasi oleh pemerintah. 	<p>Paragraph (6)</p> <p>The public has an important role in the organization and control of the Management of Coastal Zone and Small Islands, through :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. planning for management on the basis of custom and culture (<i>adat budaya</i>) and customary or existing practices within the community; b. the implementation of management by bringing up creativity and independence in the number and variety of management of Coastal Zone and Small Islands to enhance economic activities in areas which previously has not been exploited, therefore widening areas for control and organizational activities. c. the settlement of conflicts on new provisions intentionally established by the public because of its own needs, or through facilitation by the government
<p>Pasal 37</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 37</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 38</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 38</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 39</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 39</p> <p>Sufficiently clear</p>

<p>Pasal 40</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>	<p>Article 40</p> <p>Paragraph (1) Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (2) Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (3) Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (4)</p> <p>Insentif yang dapat diberikan berupa:</p> <p>a. bantuan program meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, 2. pengakuan formal dalam bentuk persetujuan atau sertifikasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas program yang diajukan oleh pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta 3. konsistensi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program. <p>b. bantuan teknis meliputi dukungan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, dukungan peralatan, peningkatan pengetahuan, komunikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat.</p>	<p>Paragraph (4)</p> <p>The types of incentive that can be offered, are :</p> <p>a. program assistance, covering :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. programs which is tailored to condition and need; 2. formal recognition in the form of approval or certification by the Government and/or the Local Government of the program proposed by the manager of the Proram for the Management of Coastal Zone nad Small Islands; and 3. the consistency of the Government and/or the Local Government in the implementation of the program. <p>b. tehcnical assistance includes support for human resources both in quality and quantity, instruments, improvement of knowledge, communication, and dissemination of the program to the public.</p>
<p>Ayat (5) Cukup jelas</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (5) Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (6) Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (7) Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (8) Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 41</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 41</p> <p>Sufficiently clear</p>

Pasal 42 Cukup jelas	Article 42 Sufficiently clear
Pasal 43 Cukup jelas	Article 43 Sufficiently clear
Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas	Article 44 Sufficiently clear Article 45 Sufficiently clear
Pasal 46 Cukup jelas	Article 46 Sufficiently clear
Pasal 47 Cukup jelas	Article 47 Sufficiently clear
Pasal 48 Cukup jelas	Article 48 Sufficiently clear
Pasal 49 Cukup jelas	Article 49 Sufficiently clear
Pasal 50 Ayat (1) Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dengan mekanisme sebagai berikut: a. Menteri mengajukan permohonan pertimbangan ke Dewan Perwakilan Rakyat, b. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri mengadakan Rapat Kerja untuk melakukan pembahasan permohonan pertimbangan, huruf a tersebut diatas, c. Menteri membentuk Tim Penelitian terpadu yang bersifat independen yang terdiri dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, otoritas ilmiah (<i>scientific authority</i>), pihak lain yang dianggap terkait, d. Hasil penelitian terpadu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri.	Article 50 Paragraph (1) The determination of Particular National Strategic Area (KSNT), is through the following mechanism : a. the Minister submit a proposal for consideration to DPR; b. DPR together with the Minister have a Working Meeting for the deliberation of the proposal for consideration of letter a above; c. the Minister establishes an integrated, independent Research Team consisting of elements of the Government, universities, scientific authority, and other relevant parties; d. the result of the integrated research shall be submitted to DPR to be used in the issuance of the consideration to the Minister
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas	Paragraph (2) Sufficiently clear Paragraph (3) Sufficiently clear

<p>Pasal 51</p> <p>Ayat 1</p> <p>Huruf a</p> <p>Kawasan strategis nasional tertentu antara lain untuk kepentingan geopolitik, pertahanan dan keamanan, Kawasan rawan bencana besar, perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi laut nasional, Pulau-Pulau Kecil terluar, dan Kawasan habitat biota endemik.</p>	<p>Article 51</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Letter a</p> <p>The particular national strategic area is established, among others for the interests of geopolitical, security and defence, area vulnerable to large disaster, the change of nucleus Zone within the national marine conservation area, outermost small islands, and habitat area of endemic biotas.</p>
<p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter b</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Letter c</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Penetapan HP-3 oleh Menteri di Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, perubahan status Zona inti pada kawasan konservasi perairan Nasional ditempuh dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri mengajukan permohonan pertimbangan ke Dewan Perwakilan Rakyat, b. Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri untuk dilakukan penelitian terpadu oleh Tim Independen, c. Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait, d. Hasil penelitian terpadu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri. 	<p>Paragraph (2)</p> <p>The issuance of HP-3 by the Minister at the Particular National Strategic Area (KSNT), license to exploit small islands which can generate huge impact on the environment, the change of status of the nucleus Zone within the National conservation area, is carried out through the following mechanism :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the Minister submits a proposal for consideration to DPR; b. DPR request the Minister to carry out integrated research by an Independent Team; c. the integrated research is carried out to guarantee objectivity and quality of the research result carried out by a government agency/institution which has the competence and scientific authority together with other relevant parties; d. the result of the integrated research is submitted to DPR, to be used as basis in the issuance of the consideration to the Minister.
<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (3)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 52</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 52</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 53</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 53</p> <p>Sufficiently clear.</p>

Pasal 54 Cukup jelas	Article 54 Sufficiently clear.
Pasal 55 Cukup jelas	Article 55 Sufficiently clear.
Pasal 56 Cukup jelas	Article 56 Sufficiently clear.
Pasal 57 Cukup jelas	Article 57 Sufficiently clear.
Pasal 58 Cukup jelas	Article 58 Sufficiently clear.
Pasal 59 Ayat (1) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi Masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.	Article 59 Paragraph (1) Mitigation is carried out to lessen disaster risk for the community within the Coastal Zone and Small Islands that is vulnerable to disaster. Mitigation is carried out through structural/physical and/or non-structural/non-physical activities.
Ayat (2) Kegiatan struktur/fisik meliputi pembangunan sistem peringatan dini, pembangunan sarana prasarana, dan/atau pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana. Kegiatan nonstruktur/nonfisik meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan peta rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penyusunan tataruang, penyusunan zonasi, pendidikan, penyuluhan, dan kesadaran masyarakat.	Paragraph (2) Structural/physical activities covers the construction of an early warning system, construction of infrastructures and/or environmental management to lessen disaster risk. Non-structural/non-physical activities covers the formulation of laws and regulations, the drawing of map/chart of disaster risk, the formulations of environmental impact assessment (AMDAL), spatial planning, zoning, education, extension and community awareness.
Ayat (3) Cukup jelas	Paragraph (3) Sufficiently clear
Ayat (4) Cukup jelas	Paragraph (4) Sufficiently clear
Pasal 60 Cukup jelas	Article 60 Sufficiently clear.
Pasal 61 Cukup jelas	Article 61 Sufficiently clear.

<p>Pasal 62</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 62</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 63</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 63</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 64</p> <p>Penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap sengketa yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan. 2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal. 3. Penyelesaian sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti kerugian, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. 	<p>Article 64</p> <p>The settlement of disputes is regulated, as follows :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Each dispute relating to the Management of Coastal Zone and Small Islands is pursued through a settlement out of court; 2. The settlement of disputes out of court is carried out by the parties through consultation, expert valuation, negotiation, mediation, conciliation, arbitration or through customs, <i>adat</i> and local wisdom. 3. The settlement of disputes on the management of Coastal Zone and Small Islands through litigation is intended to obtain a decision on the restoration of a right, amount of compensation, or other particular measures which has to be carried out by the defeated party in the dispute.
<p>Pasal 65</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Article 65</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 66</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 66</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 67</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 67</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 68</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 68</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Pasal 69</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 69</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Sufficiently clear.</p> <p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan 	<p>Paragraph (3)</p> <p>What is meant by other particular measures, among others are :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the construction or repair of waste processing unit so that the waste is in conformity with the established

<p>hidup yang ditentukan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir; 3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir. 	<p>(living) environmental quality standard;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. restore the environmental function of the coastal zone; 3. eliminate or destroy the cause of pollution and/or environmental damage within the coastal zone.
<p>Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, misalnya biaya bahan, tenaga dan alat-alat untuk tindakan sementara guna mencegah dampak negatif yang lebih besar.</p>	<p>What is meant with cost or actual expenditure is real cost which can be proven that it has been disbursed by the responsible agencies in the Management of Coastal Zone and Small Islands, for instance costs for material/substance, labour and instruments for provisional measures to prevent a larger negative impact.</p>
<p>Pasal 70</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 70</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Sufficiently clear.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	<p>Paragraph (2)</p> <p>The Government Investigation Officer (PPNS) carry out the investigation on violation of the rules in the Management of Coastal Zone and Small Islands.</p>
<p>Ayat (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 	<p>Paragraph (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besides investigators from the State Police of the Republic of Indonesia, particular government officials whose scope of mandate and responsibility covers the Management of Coastal Zone and Small Islands, is given a special competence as investigator as is stipulated in the Law on Criminal Procedures.
<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini antara lain melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. The investigator has the jurisdiction as is regulated in this Law among other through examination of the accuracy of the report and information on crimes against the Management of Coastal Zone and Small Islands, request information and/or evidence from individual or legal/corporate entity in relation to crime against the Management of Coastal Zone and Small Islands.
<p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (4)</p> <p>Sufficiently clear</p>

Ayat (5) Cukup jelas	Paragraph (5) Sufficiently clear
Pasal 71 Cukup jelas	Article 71 Sufficiently clear
Pasal 72 Cukup jelas	Article 72 Sufficiently clear
Pasal 73 Cukup jelas	Article 73 Sufficiently clear
Pasal 74 Cukup jelas	Article 74 Sufficiently clear
Pasal 75 Cukup jelas	Article 75 Sufficiently clear
Pasal 76 Cukup jelas	Article 76 Sufficiently clear
Pasal 77 Cukup jelas	Article 77 Sufficiently clear
Pasal 78 Cukup jelas	Article 78 Sufficiently clear
Pasal 79 Cukup jelas	Article 79 Sufficiently clear
Pasal 80 Cukup jelas	Article 80 Sufficiently clear
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 4739	ADDITIONAL STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2007 NO. 4739